

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literature Review

Dalam konteks penulisan ilmiah seperti skripsi, tidak ada karya yang benar-benar asli, karena karya tersebut didasarkan pada informasi dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Tinjauan literatur menjadi tahap penting dalam proses penelitian, karena berfungsi sebagai landasan teori yang mengarahkan peneliti dalam menyusun argumen dan metodologi. Landasan teori ini dapat berasal dari penelitian terdahulu dengan topik serupa atau pendapat dari para ahli yang relevan dengan subjek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, skripsi, dan berita online yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Literatur pertama berjudul **“Upaya *Global Green Growth Institute* dalam Membantu Pemerintah Indonesia Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Tahap I”** yang ditulis pada penelitian atau skripsi (Putri, 2020). Literatur ini dipilih sebagai acuan pertama oleh penulis karena memiliki kesamaan dalam membahas organisasi internasional yang memiliki peran dalam mewujudkan program pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwa Indonesia perlu menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Namun, tantangan muncul karena tren pertumbuhan ekonomi Indonesia belum stabil. Oleh karena itu, *Global Green Growth Institute* (GGGI) hadir untuk memperkenalkan pendekatan *green growth* yang bertujuan untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian ini menggambarkan tiga langkah yang dilakukan oleh GGGI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia melalui Program Green Growth dalam fase awalnya. Pertama, GGGI menyusun dokumen "*Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia: A Roadmap for Policy, Planning, and Investment*" dengan tujuan memprioritaskan pertumbuhan hijau dalam perencanaan di Indonesia. Kedua, GGGI bekerja sama dengan Agensi REDD+ dalam penyusunan "*Synthesis Report*" sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian

pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Ketiga, GGGI meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan menyelenggarakan sesi lokakarya mengenai pendekatan *green growth*. Dalam ketiga langkah tersebut, GGGI sebagai sebuah IGO melaksanakan peran informatif, operasional, dan normatif untuk mendukung upayanya.

Perbedaan Literatur dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu literatur membahas mengenai upaya Global Green Growth Institute dalam membantu pemerintah Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau tahap I pada tahun 2013 hingga 2015. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas implementasi Global Green Growth Institute dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia pada ruang lingkup tahap II atau pada tahun 2016 hingga 2020. Perbedaan jelas terlihat dari beberapa program atau strategi yang dilakukan oleh GGGI itu sendiri.

Literatur kedua berjudul **“Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia *Green Growth Program* oleh BAPPENAS”** jurnal ini ditulis oleh Rany *et al.*, 2020. Didalamnya dijelaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia membentuk Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk mengatasi masalah perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Bersama dengan *Global Green Growth Institute (GGGI)*, gagasan Pertumbuhan Ekonomi Hijau menjadi penting untuk dibahas karena prioritas negara untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi hijau mencoba mengembangkan programnya melalui beberapa cara, yaitu pengembangan proyek-proyek yang dapat dibiayai, meningkatkan investasi ekonomi hijau di beberapa sektor, dan merancang instrumen dan kebijakan ekonomi yang kreatif dan inovatif. Selain itu, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau memiliki beberapa program yang dilaksanakan, yaitu program energi, program lanskap energi, program kawasan ekonomi khusus (KEK), dan program dana iklim. Dalam pelaksanaannya, Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya manusia, desain kelembagaan, dan *trade off* yang dihadapi negara. Dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif peneliti menjelaskan pentingnya

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut. Dalam kesimpulannya jurnal ini memaparkan bahwa pengimplementasian program *green growth* ini haruslah ke setiap daerah yang ada di Indonesia melalui regulasi-regulasi Pemerintah Daerah. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia akan memahami dan sadar betapa pentingnya program *green growth* untuk keberlangsunga ekonomi maupun lingkungan. Selain itu, pelaksanaan prinsip *good governance* dalam menjalankan *green growth* program sangatlah penting agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

Literatur ketiga berjudul **“Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS”** yang ditulis oleh (Chariti & Luci, 2023) yang membahas mengenai isu penerapan ekonomi hijau terhadap pertumbuhan pendapatan Indonesia. Literatur ini membahas tentang penerapan ekonomi hijau terhadap pertumbuhan pendapatan Indonesia. Dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Oleh karena itu, penerapan ekonomi hijau dianggap sebagai strategi manajemen lingkungan yang sangat penting dan efektif dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut. Pengembangan negara melalui penerapan ekonomi hijau dipandang sebagai solusi untuk mencapai pembangunan negara yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan eksplorasi yang menggunakan teknik analisis deskriptif dan inferensial. Data yang digunakan meliputi periode 2011-2020 dengan menggunakan teknik analisis data SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara ekonomi hijau terhadap pendapatan negara, dengan nilai p yang signifikan $(0,000) < 0,05$ dan pengaruh sebesar 0,965. Hal ini menandakan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan negara di Indonesia. Studi empiris ini menyarankan bahwa pembangunan negara di masa depan harus melibatkan sistem hijau dengan fokus pada arah, kebijakan, organisasi, area, kapasitas, dan keterlibatan dari semua pihak sebagai strategi perluasan yang optimal untuk memastikan aktivitas perekonomian Indonesia memperhatikan kondisi lingkungan.

Literatur keempat berjudul *“The Analysis of Inclusive Green Growth In Indonesia”* jurnal ini ditulis oleh (Aminata *et al.*, 2022). Jurnal ini menganalisis pertumbuhan ekonomi hijau inklusif Indonesia pada tahun 2015 dan 2019. Metode yang digunakan untuk mendapatkan analisis tersebut adalah Indeks Pertumbuhan Ekonomi Hijau Inklusif (*Inclusive Green Growth Index/IGGI*), yang dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)*. Konsep pertumbuhan ekonomi yang telah meningkatkan kesejahteraan sosial, perlu diperluas dalam hal makna dan tolak ukurnya. . Konsep ini tidak hanya mengarah pada aspek kegiatan ekonomi, tetapi juga pada dampaknya terhadap seluruh masyarakat baik pada masa kini maupun masa depan. IGGI atau Indeks Green Growth, adalah sebuah indeks komposit yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesetaraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau inklusif Indonesia semakin membaik, dimana skor rata-rata di tahun 2015 adalah 3,21, meningkat menjadi 3,36 di tahun 2019. Namun, peningkatan tersebut belum ideal karena dipengaruhi oleh pilar pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, skor rata-rata pilar keberlanjutan lingkungan hidup menurun dari 4,19 di tahun 2015 menjadi 4,00 di tahun 2019, diiringi dengan menurunnya skor pilar keadilan sosial di 15 dari 34 provinsi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai IGGI yang lebih berimbang adalah dengan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan, meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi dan politik, meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di berbagai provinsi, serta meningkatkan sektor-sektor unggulan dan potensial untuk mengejar kesenjangan ekonomi antar provinsi.

Literatur kelima dalam artikel jurnal (Mubarak, 2023) yang berjudul **“Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”** memberikan analisis tentang penerapan green economy sebagai upaya dalam mencapai pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Literatur ini menjelaskan bahwa penerapan ekonomi hijau menjadi strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau dianggap memiliki kapasitas untuk mencapai lima hasil sekaligus, yang membentuk Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kerangka tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan merata; ketahanan sosial, ekonomi, dan

lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif yang menyediakan layanan lingkungan; serta pengurangan emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, konsep green economy dapat diimplementasikan di berbagai sektor, seperti energi dan industri ekstraktif, industri manufaktur, konektivitas, dan sumber daya alam terbarukan. Implementasi ekonomi hijau memerlukan keterlibatan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang berkontribusi besar terhadap dampak lingkungan. Edukasi dan tindakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan guna mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan aktor non-negara yang memiliki peran sangat penting dalam dinamika hubungan internasional. Organisasi internasional mulai hangat dibicarakan semenjak satu abad yang lalu di negara barat sebagai lembaga formal yang berkembang di abad ke-20 adalah kerjasama internasional. Sebelum adanya organisasi internasional, telah ada aliansi militer, organisasi antar pemerintah diantara negara-negara yang berdaulat, serta adanya aktor nonnegara internasional seperti gereja katolik dan kekaisaran romawi.

Clive Archer dalam bukunya *International Organization* yang dikutip oleh Perwita (2006) menyatakan bahwa organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan suatu kesepakatan antara anggota-anggotanya baik itu pemerintah atau non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama dengan anggotanya. Sebuah organisasi tidak dapat dikatakan sebagai organisasi internasional sebelum memenuhi syarat sebagai organisasi internasional, seperti yang dikemukakan oleh Clive Archer yaitu:

1. Tujuannya harus merupakan tujuan internasional.
2. Harus memiliki anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara masing-masing.
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai

markas besar (headquarter) demi kelangsungan organisasi.

4. Pejabat atau pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa atau negara.
5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (independent) dan harus masih aktif. Organisasi yang sudah tidak aktif lebih dari lima tahun tidak akan diakui lagi.

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi suatu negara, peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam beberapa kategori (Perwita, 2006), yaitu:

1. Sebagai instrumen. Digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi, terkadang organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya ataupun masalah dalam negeri negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian internasional dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama-sama.
3. Sebagai aktor independen. Dapat membuat keputusan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan dari luar organisasi. Sebuah organisasi internasional dapat menjalankan kebijakannya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Sedangkan Teuku May Rudy (2009) menjelaskan mengenai peran yang harus dimiliki oleh organisasi internasional yaitu sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk melakukan kerjasama untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk bernegosiasi dan menghasilkan satu keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Adakalanya organisasi internasional bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan, seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, peace keeping operation, dan lain-lain.

Pada hakekatnya peran organisasi internasional diatas menunjukkan bahwa organisasi internasional memang dibutuhkan dalam hubungan internasional demi ketercapaian kepentingan negara dan permasalahan dunia yang tidak terselesaikan sejalan dengan lajunya perkembangan globalisasi. Permasalahan mengenai sosial, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, HAM, human trafficking dan lain sebagainya tidak dapat diselesaikan hanya dengan peran dari pemerintah saja, namun diperlukan kerjasama dari berbagai kalangan melalui organisasi internasional.

2.2.2 *Green Politic*

Sejak tahun 1970-an, telah terjadi perkembangan gerakan lingkungan yang dipicu oleh kesadaran akan masalah lingkungan dari berbagai ilmu pengetahuan. Pada awalnya, gerakan ini terutama berfokus pada kritik terhadap kapitalisme, terinspirasi oleh pandangan Marx bahwa kepemilikan adalah akar dari berbagai masalah, terutama dalam eksploitasi kaum buruh. Namun, saat komunisme mulai ditinggalkan dan gerakan radikal mencari wacana alternatif, banyak mahasiswa beralih ke isu lingkungan sebagai platform untuk mengkritik kapitalisme. Seiring dengan perkembangan gerakan ini, isu lingkungan pun menjadi semakin penting dalam politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Politik lingkungan, atau yang sering disebut sebagai politik hijau (*Green Politics*), mulai mengalami transformasi. Gerakan yang sebelumnya lebih bersifat aksi mulai berusaha untuk mengorganisir diri dalam bentuk partai politik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa gerakan aksi saja tidak cukup untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga institusi politik seperti partai politik menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional atau lokal (Apriawan, 2011).

Gerakan *Green Politic* di Indonesia muncul akibat adanya kesadaran terhadap kondisi nasional karena pembangunan yang berorientasi terhadap pertumbuhan dan mempengaruhi kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan krisis lingkungan. *Green politic* kemudian membuat perjanjian internasional dengan seluruh negara yang disepakati perihal permasalahan lingkungan. Dalam permasalahan lingkungan ini, para aktivis lingkungan mengajak aktor *non-*

governmental dalam menangani isu lingkungan yang memburuk. Isu lingkungan menjadi agenda krusial dalam pembahasan seluruh negara di dunia yang kemudian pada tahun 1990-an negara dunia menggelar *conferences Rio earth* di Rio de Janeiro, Brazil dan membahas mengenai lingkungan hidup, pembangunan serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang diadopsi dari 178 pemerintah negara yang hadir pada konferensi PBB perihal lingkungan hidup dan pembangunan (Paterson, 2016).

Teori *green politic* memiliki keterkaitan dengan karya ilmiah yang disusun oleh penulis karena pembahasan mengenai deforestasi hutan akibat pembukaan lahan kelapa sawit yang semakin masif menimbulkan isu politik global. *Green politic* mendorong kerjasama internasional untuk mengatasi deforestasi meliputi inisiatif global seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menjaga hutan dan lahan gambut. Mengingat deforestasi hutan menyumbang perubahan iklim global dengan pelepasan efek gas rumah kaca yang tersimpan di dalam pohon dan tanah. Terutama terhadap pembukaan lahan kelapa sawit yang merupakan model pembangunan merugikan berkelanjutan karena mendukung eksploitatif kerusakan lingkungan.

2.2.3 *Green Economy*

Green Economy adalah suatu sistem ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan (Wu, dkk., 2020). Sebagai contoh, penggunaan motor listrik sedang didorong karena potensinya untuk menggantikan motor konvensional dengan tujuan mengurangi polusi di Indonesia. Dalam konteks ini, motor listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membantu memperbaiki kondisi lingkungan, mengingat Indonesia merupakan salah satu penyumbang polusi tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, ekonomi hijau umumnya dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan saat ini merupakan target global yang ingin dicapai oleh setiap negara melalui program SDGs (*Sustainable Development Goals*). Oleh karena itu, pembahasan tentang konsep dan pentingnya ekonomi hijau perlu terus

dilakukan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini mempunyai arti melakukan pembangunan pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara singkat, pembangunan harus dilakukan tanpa merusak kelestarian alam (Firmansyah, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Loiseau dan rekan (2016), green economy dijelaskan sebagai sebuah paradigma ekonomi yang memiliki implikasi yang berbeda dari ekonomi konvensional karena menempatkan prioritas pada masa depan sumber daya alam, kesejahteraan lingkungan, dan mitigasi risiko terhadap penggunaan sumber daya alam. Salah satu contoh implikasinya adalah peralihan dari penggunaan kantong plastik konvensional ke kantong plastik yang terbuat dari singkong, yang lebih mudah terurai dan memiliki dampak positif pada lingkungan. Praktik green economy didefinisikan sebagai praktik ekonomi yang mempertimbangkan perencanaan jangka panjang karena dapat membantu mengurangi kemiskinan, emisi karbon dioksida, dan degradasi ekosistem.

2.2.4 Global Green Growth Institute

Global Green Growth Institute (GGGI) adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara global. GGGI berkomitmen untuk mendorong transformasi menuju ekonomi yang ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan negara-negara anggotanya. Organisasi ini memberikan bantuan teknis, penelitian, serta peningkatan kapasitas kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utama GGGI adalah mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan dan pengurangan kemiskinan. Organisasi ini berupaya menciptakan kesempatan ekonomi baru, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui promosi inovasi dan investasi berkelanjutan. GGGI juga bertindak sebagai forum bagi negara-negara anggota untuk berbagi

pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam upaya mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, GGGI memainkan peran penting dalam mempromosikan perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan secara global (GGGI, 2024).

Global Green Growth Institute (GGGI) didirikan dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan integrasi keduanya menjadi krusial bagi masa depan umat manusia. GGGI berkolaborasi dengan mitra di sektor publik dan swasta di negara-negara berkembang di seluruh dunia untuk memprioritaskan pertumbuhan yang ramah lingkungan dalam perencanaan ekonomi. GGGI memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang dan berkembang yang berusaha menerapkan strategi pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan hijau secara ketat. Melalui riset yang mendalam terkait berbagai aspek teori dan praktik pertumbuhan ekonomi hijau, GGGI memfasilitasi keterlibatan keahlian dan sumber daya dari sektor swasta dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Global Green Growth Institute (GGGI) berpusat di Seoul, Korea Selatan. GGGI memiliki 39 anggota, dan beroperasi di 33 negara. Perjanjian antara Republik Indonesia dan GGGI, yang dikenal sebagai *Host Country Agreement* (HCA) dan menetapkan kehadiran GGGI di Indonesia, telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juli 2020. Dengan ratifikasi HCA ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerjasama dengan GGGI dalam upayanya untuk beralih ke ekonomi rendah karbon, serta melanjutkan implementasi Program Pertumbuhan Hijau di Indonesia.

Program Pertumbuhan Hijau di Indonesia dimulai pada tahun 2013, yang merupakan program bersama antara Pemerintah Indonesia dan GGGI. Sejak itu, Program Pertumbuhan Hijau terus mengembangkan strategi dan pendekatan untuk pertumbuhan hijau di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai focal point, dan melibatkan sejumlah institusi pemerintah di tingkat nasional maupun sub-nasional. Program Pertumbuhan Hijau percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan

hanya dua tujuan yang kompatibel. Pada kenyataannya, integrasi kedua tujuan ini sangat penting untuk masa depan umat manusia. Oleh karena itu, HCA menjadi instrumen penting bagi GGGI untuk terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan integrasi tersebut di Indonesia. HCA juga mengatur GGGI dalam menjalankan mandat dan fungsinya sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Ratifikasi HCA oleh Presiden meresmikan dan memperkuat kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan GGGI untuk menjalankan Program Pertumbuhan Hijau sebagai salah satu penggerak pembangunan yang berkelanjutan di negara ini. Dengan diratifikasi HCA, GGGI berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan mencapai cita-cita pembangunan rendah karbon, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan janji Indonesia dalam Perjanjian Paris, sebagai juga diarusutamakan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

2.2.5 Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program*) di Indonesia dimulai pada tahun 2013, merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI), bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), serta melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan tidak hanya dapat berjalan seiring, tetapi keduanya juga saling mendukung untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi manusia. Oleh karena itu, *Host Country Agreement* (HCA) menjadi instrumen penting bagi GGGI untuk terus mendukung Pemerintah dalam mengintegrasikan aspek-aspek tersebut di Indonesia. Dengan meratifikasi HCA, GGGI berkomitmen untuk terus mendampingi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan rendah karbon, sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris, yang diprioritaskan dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sejak 2013, program ini berupaya mengembangkan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimungkinkan melalui dukungan dana dari Pemerintah Norwegia pada Tahap I (2013-2015) dan Tahap II (2016-2020). Pemerintah Indonesia memahami peluang dan potensi ekonomi hijau sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di negara ini. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau, pendekatan sistematis dengan langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengarahkan Indonesia menuju visi ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi hijau tidak hanya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dengan kualitas pertumbuhan yang memperhatikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang meningkatkan kualitas hidup semua lapisan masyarakat. Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Framework-GGF*) untuk Indonesia, yang telah dirumuskan oleh berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, menjabarkan lima hasil yang diharapkan dari ekonomi tersebut dengan menyatukan pertumbuhan ekonomi hijau yang bermutu tinggi di seluruh sektor produktif.

1. Pertumbuhan ekonomi berkembang
2. Pertumbuhan inklusif dan adil
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan
4. Ekosistem sehat dan produktif
5. Pengurangan emisi gas rumah kaca



Gambar 1. Lima hasil yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi hijau

(Sumber: *The Government Of Indonesia & GGGI, 2015*)

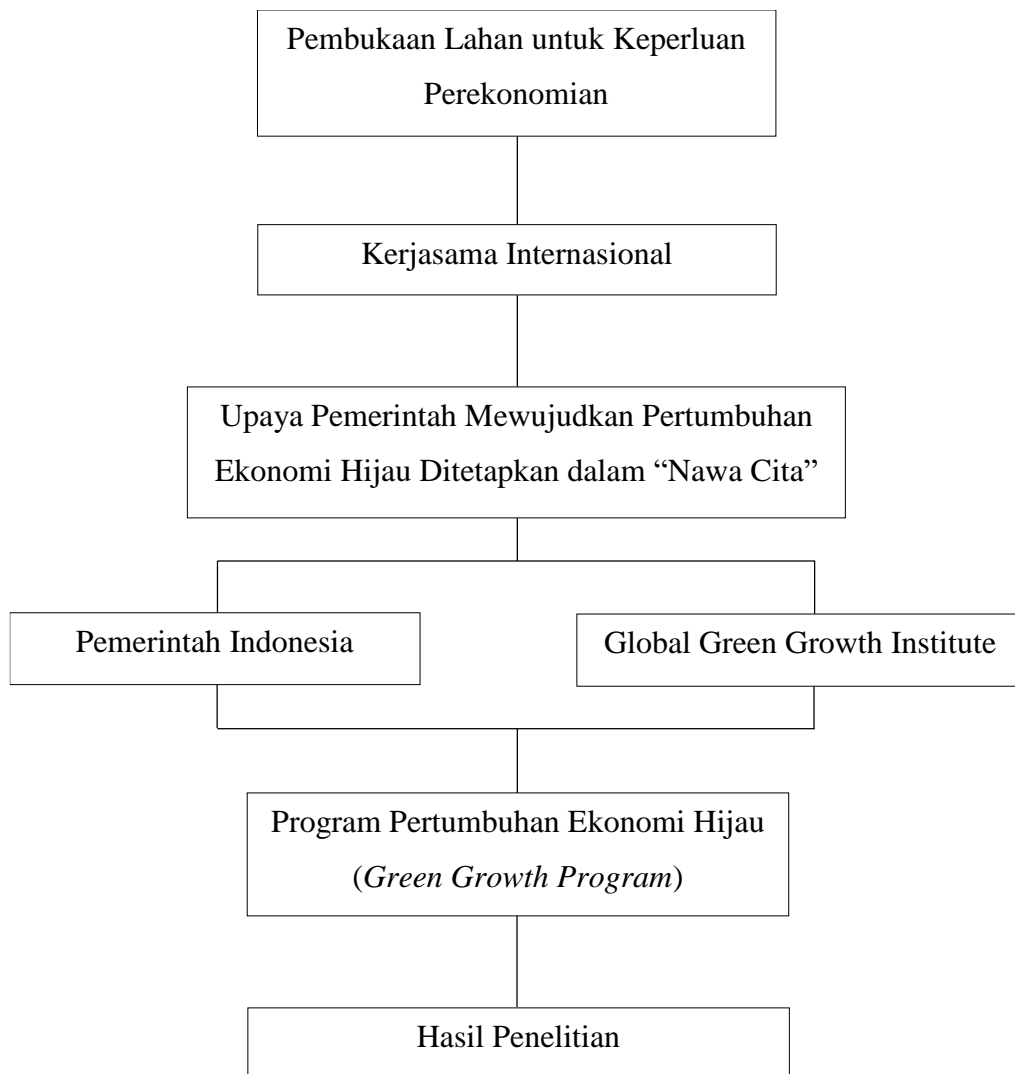
Hasil ini secara erat terhubung dengan prinsip-prinsip yang dibahas dalam Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau (Green Planning and Budgeting) Kementerian Keuangan. Sebagai contoh, GPB menggunakan prinsip "penilaian yang lebih kuat terhadap sumber daya alam" sebagai salah satu prinsip utama yang terkait dengan hasil "ekosistem yang baik dan produktif". Begitu juga, penekanan GPB pada "ketahanan pangan, air, dan energi" mencerminkan fokus pada "ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan". Beberapa elemen kunci untuk mencapai kesuksesan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau cenderung serupa di antara berbagai negara maju dan berkembang. Elemen-elemen kunci ini termasuk kepemimpinan politik, kepemimpinan sektor swasta, dan kombinasi yang sesuai dari kebijakan dan insentif untuk mengalihkan produksi, konsumsi, dan investasi ke praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.3. Asumsi Penelitian

Asumsi yang disusun merupakan suatu hal yang harus dijelaskan oleh penulis dan diyakini kebenarannya atas dugaan-dugaan yang muncul berdasarkan teori yang terkait. Asumsi penelitian memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta teori-teori yang telah disusun oleh penulis ketika melakukan penelitian ilmiah sebagai praduga sementara sehingga kebenaran dari asumsi yang diputuskan masih perlu diuji. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menarik asumsi bahwa beberapa program berjalan dengan efektif, namun perlu tindak lanjut untuk menyempurnakan program tersebut dengan adanya program green growth tahap III. Asumsi ini didasarkan pada program green growth tahap I yang sudah berjalan cukup efektif, namun perlu dilakukan keberlanjutan melalui program *green growth* tahap II ini. Asumsi didasarkan oleh penelitian Putri (2020), yaitu tiga upaya GGGI pada program green growth tahap I yang pertama menyusun dokumen *Delivering Green Growth for a Prosperous Indonesia : A Roadmap for Policy, Planning, and Investment* sebagai upaya untuk mengutamakan pertumbuhan hijau pada perencanaan pembangunan di Indonesia. Kedua, GGGI Berkolaborasi dengan

agensi REDD+ dalam penyusunan *Synthesis Report* sebagai panduan dalam upayanya untuk mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Ketiga, GGGI melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dengan sesi lokkarya mengenai pendekatan green growth. Dalam ketiga upaya tersebut, GGGI sebagai sebuah IGO melaksanakan fungsi infomasi, operasional, dan normatif dengan baik dalam melancarkan upayanya.

Kerangka Analisis



Gambar 2. Bagan Kerangka Analisis
(Sumber : Hasil Pengolahan, 2024)

